

# PERUNDINGAN PERDAMAIAN PALESTINA-ISRAEL

Simela Victor Muhamad<sup>\*)</sup>



## Abstrak

*Proses perundingan perdamaian Palestina-Israel yang terhenti sejak tiga tahun lalu dicoba dihidupkan lagi oleh Amerika Serikat (AS) dengan mengajak kedua belah pihak untuk bersedia kembali ke meja perundingan. AS tidak berharap perundingan yang digagasnya ini macet seperti tahun 2010. Banyak pihak pesimis terhadap proses perundingan damai ini, antara lain dikarenakan Israel masih saja melanjutkan kebijakan pembangunan permukiman di tanah pendudukan di Jerusalem Timur dan Tepi Barat. Terhadap perundingan damai Palestina-Israel yang kembali diupayakan oleh AS, di satu sisi kita perlu mengapresiasi hal tersebut dan berharap upaya AS tersebut dilandasi oleh keinginan yang tulus untuk membangun perdamaian di Timur Tengah, tetapi di sisi lain kita juga perlu mengkritisi jangan sampai ada agenda lain dari AS dalam pelaksanaan politik luar negerinya di Timur Tengah.*

## A. Pendahuluan

Perhatian sebagian masyarakat internasional kini tertuju pada isu seputar perundingan damai Palestina-Israel yang dalam hari-hari belakangan ini kembali menjadi pemberitaan media massa. Pасalnya, proses perundingan damai Palestina-Israel yang terhenti sejak tiga tahun lalu itu coba dihidupkan lagi oleh Amerika Serikat, melalui upaya Menteri Luar Negeri John Kerry, dengan mengajak kedua belah pihak untuk bersedia kembali ke meja perundingan melanjutkan proses perdamaian.

Seperti yang sudah-sudah, setiap perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina digelar, selalu muncul pendapat bernada optimistis ataupun pesimistis. Sangat wajar muncul sikap dan pandangan seperti itu. Ini karena memang sudah berkali-kali perundingan digelar, sejak akhir perang 1967, tetapi lebih banyak kegagalannya daripada keberhasilannya, seperti Perundingan Camp David 1978 yang mengakhiri perang Israel dan Mesir.

Sementara perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina yang bisa dikatakan berhasil -meski ditolak oleh Hamas dan

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: victorsimela@yahoo.co.id



kelompok-kelompok lain- adalah Perjanjian Oslo 1993. Perjanjian ini menjadi dasar pembentukan “Otoritas Pemerintahan Sendiri Sementara Palestina.” Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk mengakhiri konfrontasi dan konflik serta saling mengakui “hak-hak politik dan keabsahan eksistensi mereka.” Setelah itu, nyaris tidak ada hasil dari setiap perundingan perdamaian di antara keduanya. Lalu, apa yang bisa diharapkan dari perundingan kali ini?

## **B. Dilaksanakan Saat Tingkat Kepercayaan Rendah**

Menteri Luar Negeri AS John Kerry sebagai “motor” dari perundingan di Jerusalem tampaknya sadar akan hal itu. Karenanya, ia tidak mau mengulangi kesalahan, misalnya kesalahan perundingan tahun 2010 yang macet. Misalnya, jangka waktu perundingan akan panjang, yakni 9 bulan; perundingan tidak dilakukan para pemimpin tertinggi kedua belah pihak seperti sebelumnya karena jika menemui jalan buntu, tidak bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Perundingan dilakukan oleh para pejabat tinggi: Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni dan perunding Palestina, Saeb Erekat. Penghentian pembangunan permukiman juga tidak menjadi prasyarat bagi pelaksanaan perundingan. Itulah sebabnya beberapa hari lalu Israel mengumumkan membangun permukiman baru di Jerusalem setelah pembebasan tahanan Palestina.

Terlepas dari semua itu, pokok perundingan kali ini tetaplh 4 hal: Status Jerusalem, perbatasan dan permukiman, pengungsi Palestina, serta keamanan. Keempat isu itu harus diselesaikan untuk tercapainya perdamaian di antara kedua belah pihak. Untuk isu Jerusalem, misalnya, Palestina menginginkan Jerusalem timur sebagai ibu kota, tetapi Israel tidak mau membagi kota itu. Palestina juga menginginkan dipulihkannya garis perbatasan sesuai dengan kondisi seperti pecah perang 1967, namun Israel belum sepaham. Terkait masalah pengungsi Palestina, Israel menolak gagasan “hak kembali” orang-

orang Palestina ke kampung halaman mereka. Israel juga menginginkan pengaturan final yang akan menjamin keamanannya. Sementara Palestina menginginkan negaranya mendapat jaminan keamanan dari tentara Israel dan tidak ada kompromi soal kedaulatan.

Memang banyak persoalan yang belum bisa diselesaikan. Namun, apapun hasilnya nanti, usaha untuk mengupayakan perdamaian tetap harus dilakukan walau sebenarnya perundingan kali ini dilaksanakan ketika tingkat kepercayaan kedua belah pihak di titik paling rendah.

Di tengah ketegangan yang tinggi dan rendahnya harapan, juru runding Israel dan Palestina, pada 14 Agustus 2013, melakukan pembicaraan damai di sebuah tempat yang dirahasiakan di Jerusalem. Kedua belah pihak serius melakukan pembicaraan, tetapi belum ada rincian tentang subyek pembicaraan. Keduanya sepakat untuk menahan diri mengungkap informasi dan mencegah kebocoran informasi kepada media. Seorang pejabat Palestina mengatakan, mereka sepakat untuk bertemu setiap pekan, bergantian antara Jerusalem dan kota Jerikho di Tepi Barat.

## **C. Isu Permukiman: Dapat Menghambat Perundingan**

Pembicaraan damai tersebut dilakukan di tengah rencana Israel membangun permukiman di wilayah pendudukan di Jerusalem Timur dan Tepi Barat. Hal ini membuat para pejabat Palestina marah dan menilai bahwa rencana tersebut justru memperkeruh suasana menjelang pembicaraan damai. Timbul pendapat bahwa Israel terus memainkan politik dua kakinya menjelang perundingan damai dengan Palestina. Saat otoritas Zionis itu melepaskan sejumlah tahanan Palestina, pada waktu bersamaan pula mereka terus memperluas pembangunan permukiman ilegal di tanah pendudukan.

Keputusan untuk kembali memperluas permukiman Yahudi itu diumumkan pada 11 Agustus 2013 oleh Menteri Perumahan Israel Uri Ariel. Dikatakan oleh Menteri

Perumahan Israel bahwa pemerintah telah menyetujui pembangunan 1.187 unit rumah baru. Dari jumlah itu, sebanyak 793 unit di antaranya akan dibangun di Jerusalem Timur. Sedangkan, 394 unit akan didirikan di Tepi Barat, termasuk di wilayah Efrat, Ariel, dan Maaleh Adumim. Pengumuman itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Israel merilis 26 nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan. Secara keseluruhan, Israel berjanji akan membebaskan 104 tahanan dalam empat tahap sebagai bagian dari “kompromi” perundingan damai dengan pihak Palestina yang diperantarai AS. Pembebasan tahanan merupakan isu yang sangat kontroversial di Israel, terutama menyangkut tahanan yang terlibat pembunuhan warga Israel.

Amerika Serikat yang menginisiasi dialog tidak bersikap tegas atas rencana Israel. Meskipun mengecam pembangunannya, menurut pihak AS, keputusan Israel bukanlah alasan untuk menggagalkan perundingan. Menteri Luar Negeri AS John Kerry berharap Palestina tidak menanggapi persoalan ini secara berlebihan sehingga menggagalkan proses perundingan. Sikap AS terhadap tanah pendudukan Israel, kata Kerry, tetap tidak berubah. Kebijakan Israel membangun permukiman tidak sah. Namun, menurut Kerry, cara terbaik untuk memecahkan persoalan pelik ini, yakni dengan menyelesaikan masalah keamanan dan perbatasan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS di Washington Marie Harf mengatakan, AS merasa sangat prihatin dengan pengumuman rencana pembangunan permukiman Yahudi tersebut, karena, rencana ini bisa menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan pihak Palestina.

Pihak Palestina sudah tentu mengecam pembangunan permukiman tersebut. Negosiator senior Palestina Saeb Erekat menilai, sikap Israel tersebut memupuskan solusi antara kedua pihak. Israel membantah kritik tersebut. Menurut Juru Bicara PM Netanyahu, Mark Regev, setiap inisiasi perdamaian, pihaknya selalu mengusulkan tanah pendudukan sebagai wilayah Israel. Juru Bicara Uni Eropa dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengkritik rencana Israel. Rusia

bahkan menggambarkan tindakan Israel sebagai langkah kontra-produktif yang merumitkan suasana pembicaraan. Sekitar 500.000 orang Yahudi tinggal di lebih dari 100 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel pada 1967 di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Permukiman dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel menentang keputusan itu. Jerusalem Timur dianeksasi otoritas Zionis dalam Perang Timur Tengah 1967. Mayoritas kalangan internasional tidak mengakui tanah pendudukan Israel.

## **D. Banyak yang Pesimis**

Banyak negara Arab yang pesimis terhadap upaya menghidupkan lagi perundingan damai Palestina-Israel. Beragam alasan mereka kemukakan. Namun, ada pula yang optimistis terhadap upaya perdamaian tersebut. Wajar, kalau muncul pendapat pro dan kontra, pesimis dan optimis, bahkan baik di dalam negeri Israel maupun Palestina.

Fakta di lapangan memang mendorong orang untuk pesimis terhadap perundingan damai itu. Sebut saja, di dalam kubu pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ada sejumlah orang, tokoh berhaluan keras yang menentang perdamaian. Demikian pula dalam tubuh Palestina. Kita tahu bahwa Palestina terbagi dua: Ada kelompok moderat pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan ada pula kelompok penentang perundingan perdamaian, yakni Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Hamas bahkan menentang hak eksistensi negara Israel.

Persoalan yang dibahas dalam perundingan pun masih masalah yang sama – karena memang itulah persoalan pokok konflik: Dari masalah perbatasan dan keamanan sampai status Jerusalem, serta nasib pengungsi Palestina. Itulah persoalan-persoalan yang tidak pernah dapat diselesaikan dalam setiap perundingan.

Melihat semua itu, wajar bahwa ada pihak-pihak yang pesimis. Namun, inilah sebuah usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin meninggalkan “warisan,” baik itu

Netanyahu maupun Abbas. Ada juga pendapat bahwa kegagalan perundingan hanya akan melahirkan kelompok-kelompok radikal baru yang menentang perdamaian. Apa pun, ini usaha menciptakan perdamaian, yang tentu akan menghadapi sejumlah rintangan dan tantangan. Apalagi salah satu pejabat senior Palestina, Yasser Abed Rabbo, yang ditugaskan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk terlibat dalam perundingan menyatakan bahwa “Israel akan terus membangun (permukiman) dan menghindar. Mereka menuntut hal yang mustahil sehingga negosiasi ini sia-sia.”

## E. Penutup

Terkait dengan perundingan damai Palestina-Israel, Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa menyatakan bahwa semua upaya menghidupkan kembali perdamaian di Timur Tengah, terutama Palestina, sangat tergantung pada kesungguhan Israel untuk menyelesaikannya, karena Israel yang menjadi akar permasalahan sengketa tak berkesudahan tersebut. Upaya menghidupkan kembali proses perdamaian hanya bisa dijalankan, jika Israel memperlihatkan keinginan sungguh-sungguh untuk terlibat dalam penyelesaian isu penting. Untuk mewujudkannya, masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB perlu memastikan bahwa Israel menghormati dan mematuhi berbagai resolusi PBB yang berkaitan dengan konflik, seperti resolusi 242 tahun 1967, 338 (1973), dan 1397 (2002).

Indonesia, seperti juga banyak negara lain, menginginkan persoalan ini diselesaikan melalui jalur perundingan lewat konsep solusi dua negara. Melalui konsep itu, Palestina diproyeksikan menjadi negara berdaulat dan merdeka yang akan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan negara Israel. Konsep itu mengandung konsekuensi: Indonesia nantinya harus mengakui entitas Israel sebagai

negara dan sekaligus membuka hubungan diplomatik. Namun yang utama tetap kemerdekaan Palestina dan keanggotaannya sebagai sebuah negara di PBB. Dengan kata lain, tak akan pernah ada pengakuan dan hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang Palestina belum merdeka. Solusi dua negara berdasarkan peta perbatasan sebelum perang Arab-Israel tahun 1967.

Terhadap perundingan damai Palestina-Israel yang kembali diupayakan oleh AS, di satu sisi kita perlu mengapresiasi hal tersebut dan berharap upaya AS tersebut dilandasi oleh keinginan yang tulus untuk membangun perdamaian di Timur Tengah, tetapi di sisi lain kita juga perlu mengkritisi jangan sampai ada agenda lain dari AS dalam pelaksanaan politik luar negerinya di Timur Tengah. Kita tidak berharap upaya AS tersebut sekadar untuk mengalihkan perhatian dan pencitraan di tengah-tengah krisis politik yang melanda sejumlah negara di Timur Tengah saat ini.

## Rujukan:

1. “Israeli-Palestinian talks set to resume Wednesday,” *International Herald Tribune*, 10 Agustus 2013.
2. “Israel Perluas Permukiman,” *Republika*, 13 Agustus 2013.
3. “26 Tahanan Palestina Segera Dibebaskan,” *Media Indonesia*, 13 Agustus 2013.
4. “Talks resume under cloud of Israeli construction,” *The Jakarta Post*, 14 Agustus 2013.
5. “AU Israel Serang Gaza,” *Kompas*, 15 Agustus 2013.
6. “Mideast talks to resume as Palestinians freed,” *The Jakarta Post*, 15 Agustus 2013.
7. “Pembicaraan Damai Dimulai,” *Kompas*, 16 Agustus 2013.
8. Trias Kuncahyono, “Jerusalem 1948 dan 1967,” *Kompas*, 16 Agustus 2013.